

# Defeminisasi Kemiskinan Berbasis Komunitas di Mondoluku Wringinanom Gresik

**MUHAMMAD FAHMI**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
fahme\_yes@yahoo.com

**Abstrak:** Feminisasi kemiskinan (kemiskinan berwajah perempuan) semakin tampak menggejala di masyarakat, tidak terkecuali di desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Bentuknya bisa beragam. Mulai dari miskin partisipasi, gaji atau upah yang dihargai separohnya laki-laki, tingkat pendidikan yang dinomorduakan, dan masih banyak lagi. Melalui pendampingan yang intens oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Kelompok-Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K), feminisasi kemiskinan berusaha dilawan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan peran aktor-aktor lokal yang berasal dari komunitas yang diberdayakan, sehingga terjadi defeminisasi kemiskinan (pembongkaran kemiskinan berwajah perempuan). Kegiatannya beragam. Mulai dari *knowledge development* (riset), advokasi berbasis data (audiensi dengan aparat pemerintah baik di level desa maupun kabupaten), *capacity building* (pembentukan sekolah perempuan, *training*, diskusi-diskusi terfokus tentang tema-tema pentingnya perempuan berdaya dan keluar dari kemiskinannya), sampai dengan pengembangan jaringan (*networking*). Hasilnya cukup menakjubkan. Perempuan-perempuan miskin yang didampingi, yang awalnya miskin partisipasi menjadi berani partisipasi di ranah publik. Perempuan yang awalnya hanya menjadi *konco wingking* dan selalu dinomorduakan, menjadi berani untuk bersikap setara dengan laki-laki. Akhirnya upaya menuju kesetaraan gender dan keluar dari kemiskinan perempuan sedikit demi sedikit mulai tercapai.

**Kata kunci:** *Defeminisasi kemiskinan, komunitas lokal dan mondoluku.*

## Pendahuluan

Mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan. Ini menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan, yakni sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan. Dengan

kata lain, kemiskinan memiliki wajah perempuan. Meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama bisa miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Kemiskinan perempuan disebabkan banyak faktor yang cukup kompleks. Meski demikian, ia bisa ditelaah melalui dua hal.<sup>1</sup> Pertama, perspektif ekonomi. Secara gamblang kemiskinan dan pemiskinan perempuan ini terlihat dalam sektor ekonomi. Perempuan yang hidup dalam belunggu kemiskinan senantiasa kesulitan mendapatkan akses sumber daya ekonomi. Untuk bekerja mereka tidak diakui dan tidak dihargai. Dalam bekerja, perempuan mendapat upah separo dari apa yang diperoleh laki-laki.

Perempuan ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dibandingkan laki-laki dari kategori yang sama. Perempuan yang tidak memiliki penghasilan jauh lebih buruk situasinya dibandingkan perempuan yang mempunyai penghasilan dalam keluarga dengan tingkat ekonomi subsisten. Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi.

Kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa menjadi salah satu cara laki-laki melepaskan tanggung jawab atas keluarganya dengan menceraikan istrinya. Dalam berbagai kasus perceraian, perempuan cenderung mengambil beban terbesar untuk membesarkan anak-anak, dengan atau tanpa sumbangan mantan suaminya. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga miskin juga menghadapi resiko besar karena tidak punya akses kepemilikan tanah dan modal, informasi, dan pasar kerja.

Kedua, perspektif politik. Dalam dimensi ini, perempuan tidak terwakili secara proposional di antara kelompok miskin dan tidak punya kekuasaan. Kemiskinan perempuan ini antara lain berupa kerentanan hidup (*vulnerability*), kesempatan dan suara (*voicelessness and powerlessness*), serta didukung pemerintah yang sangat bias gender (*male-biased government system*). Dimensi kemiskinan gender, bias gender juga mudah ditemui dalam kebijakan struktural, perbedaan efek kebijakan dan dana yang

---

<sup>1</sup> <http://gksbs.org/?p=852> (Diakses pada 12 Maret 2014).

tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum perempuan. Jadi, diskriminasi terhadap perempuan sangat kental.

Di Kabupaten Gresik, wajah kemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) tampak sekali di lapangan. Kurangnya akses pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi perempuan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah Gresik, menjadi salah satu penyebabnya. Diskusi-diskusi seputar kemiskinan, masih dikuasai oleh mayoritas suara laki-laki. Pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani dan pemberdayaan masyarakat tani yang dibentuk oleh lembaga-lembaga non-government pun masih menjadi kelompok laki-laki. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah karena laki-laki yang paling mudah digerakkan dalam melakukan perubahan sosial. Entahlah, apakah alasan ini benar berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat, atautkah sekedar menghindari “usaha yang sedikit keras” untuk melakukan penyadaran gender dalam masyarakat.

Kondisi yang tak terhindarkan adalah bahwa sebagian besar perempuan Gresik hidup di pedesaan dan mencari penghasilan dari dunia pertanian. Sayangnya mereka kurang mendapatkan perhatian. Meskipun demikian, nilai *perkawanan-paseduluran* dan gotong royong yang ada di Kabupaten Gresik dapat memberikan harapan terjadinya keadilan gender dan melibatkan kaum perempuan dalam melakukan perubahan sosial, khususnya mengubah kondisi kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka. Pemberian kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan dapat menjadi langkah awal melakukan transformasi sosial. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang setara dalam mengekspresikan diri, melayani dan mendapatkan hak mereka secara adil.

Secara umum tingkat pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki karena banyak faktor antara lain jenjang pendidikan yang lebih rendah dan buta aksara yang masih tinggi, rendahnya partisipasi perempuan di publik, sehingga perempuan terbatas untuk mendapatkan penghasilan dan budaya patriarki di masyarakat yang menganggap perempuan memang harus dibedakan dengan laki-laki walaupun pekerjaan yang dilakukan sama-sama beratnya.

Kabupaten Gresik termasuk salah satu kabupaten yang belum mampu mandiri. Indikator kemiskinan di kabupaten Gresik relatif masih cukup tinggi. Untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada bulan Maret 2010 sebesar 193.296 orang (16,42 %) dari jumlah penduduk Gresik.

Dari hasil PPLS tahun 2011 ada pengelompokan menurut 3 kategorisasi, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Ruta dan Individu Ruta Kab. Gresik dengan Status Kesejahteraan <30% Terendah<sup>2</sup>

Kategori	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu Rumah Tangga
Kelompok 1	42.575 Ruta (43,70 %)	179.192 individu (47,30 %)
Kelompok 2	27.426 Ruta (28,15 %)	101.127 individu (26,70 %)
Kelompok 3	27.426 Ruta (28,15 %)	98.494 individu (26,00 %)
Jumlah	97.426 Ruta	378.813 individu
Keterangan:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok 1 Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 % terendah</li> <li>• Kelompok 2 Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah</li> <li>• Kelompok 3 Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30%</li> </ul>		

Dari data yang diperoleh dari Bappeda Propinsi Jawa Timur, masih banyak perempuan dalam kondisi rawan sosial ekonomi (*women which powerless in social economic*), di Kabupaten Gresik ditemukan sebanyak 3.841 orang.<sup>3</sup> Belum lagi perempuan yang tidak bersekolah, di Gresik relatif cukup besar. Untuk lokasi Kabupaten Gresik sendiri, jumlah perempuan yang tidak bersekolah usia 7-12 tahun sebanyak 823 anak, usia 13-15 tahun sebanyak 1022 anak, usia 16-18 tahun sebanyak 2229 anak. Total perempuan yang tidak bersekolah di Kabupaten Gresik pada tahun 2010 sebanyak 4074 anak.<sup>4</sup>

Di Gresik, kecenderungan perempuan mengalami kemiskinan karena terhempasnya lahan-lahan pertanian beralih ke sektor industri, kebanyakan mereka bekerja di Surabaya menjadi PRT dan industri. Bahkan di salah satu daerah di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagian besar perempuannya menjadi TKW ke Malaysia karena tuntutan ekonomi keluarga. Sedangkan yang sulit terpantau dalam banyak hal adalah

<sup>2</sup> Bappeda Kab. Gresik, *Dokumen Draft Laporan Akhir Program PJM-PRONANGKIS Kab.Gresik 2012* (Gresik: Bappeda, 2012),

<sup>3</sup> BPS, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* (Gresik: BPS, 2009)

<sup>4</sup> KPS2K, *Profil Kabupaten Gresik*, Makalah tidak Dipublikasikan, 2013.

perempuan yang tinggal di Pulau Bawean yang masih sulit akses transportasinya, pulau ini juga dikenal sebagai pulau putri karena mayoritas ditinggal laki-laki untuk bekerja di luar pulau.

Terkait adanya kemiskinan berwajah perempuan (feminisasi kemiskinan) ini, terjadi juga di salah satu daerah di kabupaten Gresik, yakni Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom. Diperoleh fakta bahwa perempuan di sini lebih rentan mengalami kemiskinan daripada laki-laki, hal ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka perempuan yang dinikahkan usia anak sehingga mereka rentan untuk mengalami perceraian dan sebagian besar karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu kasus penelantaran dan kekerasan. Selain itu tingkat pendidikan perempuan yang relatif masih rendah dibanding laki-laki, serta angka buta aksara yang tinggi bagi komunitas perempuan memicu perempuan untuk tidak dapat bekerja di sektor formal karena tidak mempunyai ijazah dari sekolah formal.

Beberapa wajah kemiskinan perempuan di desa Mondoluku tersebut tampak dalam beberapa gambaran sebagai berikut.<sup>5</sup> Pertama, Potret feminisasi kemiskinan tergambar dalam beberapa bentuk, antara lain: kemiskinan dalam hal ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan formal, terjadinya pernikahan pada usia dini, beban kerja ganda yang dialami, kekerasan dalam rumah tangga, minimnya partisipasi di publik, terjadinya domestikasi perempuan, rendahnya upah kerja, dan rendahnya kewenangan mengambil keputusan dibandingkan laki-laki.

Kedua, Sejarah kemiskinan perempuan diawali dari kondisi yang beragam, antara lain: perempuan mengalami kemiskinan karena memang dilahirkan dari keluarga yang miskin dan nenek moyangnya juga miskin, sehingga terjadilah pewarisan kemiskinan. Ada juga perempuan miskin itu yang dilahirkan dari keluarga kaya, dan kemudian perempuan itu menjadi miskin karena orang tuanya meninggal, padahal ketika orang tua masih hidup, sumber penghasilan ekonomi si perempuan itu berasal dari usaha membantu kerja orang tua. Maka ketika orang tua meninggal, si perempuan dan suaminya tidak bisa lagi meneruskan usaha orang tuanya. Jadilah ia dalam kondisi kemiskinan. Ada juga perempuan yang miskin karena ditinggal mati suami atau diceraikan, padahal ketika masih bersuami, sumber penghasilan ekonominya hanya mengandalkan suami.

---

<sup>5</sup> M. Fahmi, dkk., *Problem Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Gresik* (Surabaya: Jaudar Press, 2015).

Ketiga, Penyebab kemiskinan perempuan juga beragam, ada yang berpandangan bahwa kemiskinannya terjadi karena takdir Tuhan. Ada juga yang berpandangan bahwa kemiskinannya disebabkan karena kemalasanannya sendiri, atau karena tidak punya keterampilan untuk bekerja, atau karena pendidikannya rendah sehingga sulit mencari pekerjaan. Ada juga yang berpendapat bahwa kemiskinan perempuan terjadi karena budaya patriarkhi (budaya yang lebih mengutamakan laki-laki dan menomorduakan perempuan), sehingga perempuan terbatas ruang geraknya untuk keluar dari kemiskinan. Ada juga yang berpandangan bahwa perempuan mengalami kemiskinan dan pemiskinan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memposisikan perempuan bisa keluar dari kemiskinan.

Keempat, Dampak kemiskinan yang dialami perempuan juga beragam, ada yang karena kehidupannya yang miskin, maka sering mendapat perlakuan kasar dari suami dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang karena kemiskinannya, kemudian diceraikan suami. Ada juga yang mengalami gunjingan dari tetangga karena kondisi kemiskinannya. Karena miskin, perempuan sering mengalami sub-ordinasi dan marginalisasi.

Kelima, Kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam mengatasi kemiskinan perempuan cukup banyak. Hal ini terlihat dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada, terkait dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan perempuan. Diantara program-programnya adalah: Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Program Penigkatan Keluarga Berencana, dan masih banyak lagi.

Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan berwajah perempuan, cenderung masih bersifat normatif, misalnya, dalam bentuk regulasi dan perencanaan pembangunan yang bersifat menara gading dan belum menyentuh sudut-sudut daerah pinggiran secara masif. Sehingga perlu dilakukan kebijakan yang lebih bersifat massif dengan melibatkan aktor-aktor sosial lokal yang mampu untuk mengatasi kemiskinan perempuan di tingkat desa.

Dalam kaitan ini, menarik untuk mengkaji kiprah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) dalam program Gender Watch, yang salah satu gerakannya adalah upaya membongkar dan mengatasi kemiskinan perempuan (defeminisasi kemiskinan) berbasis komunitas, dan penulis

pernah terlibat dan bergabung di dalamnya dalam program dan gerakan pengabdian dan pemberdayaan perempuan di desa tersebut. Hal-hal yang terkait dengan pengalaman pengabdian penulis tentang upaya defeminisasi kemiskinan inilah yang ditulis dalam paper ini.

## **Defeminisasi Kemiskinan Berbasis Komunitas**

Maksud dari defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas di sini adalah pembongkaran atau perlawanan terhadap situasi dan kondisi kemiskinan perempuan yang dilakukan oleh penulis bersama Tim KPS2K dengan memanfaatkan potensi masyarakat lokal. Komunitas yang dimaksud adalah perempuan-perempuan miskin pedesaan yang ada di lokasi pengabdian dan pemberdayaan di Mondoluku Wringinanom Gresik. Komunitas tersebut diberdayakan atau ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melawan kemiskinannya.

Defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas ini menggunakan perspektif dan analisis gender dan pluralisme sebagai instrument utamanya. Ada tiga hal yang dipertajam oleh analisis gender dan pluralisme dalam defeminisasi kemiskinan ini. Pertama, analisis gender dan pluralisme ini memastikan kelompok perempuan miskin dan marginal yang selama ini terpinggirkan dapat terlibat aktif dalam proses-proses pembangunan. Kedua, analisis gender dan pluralisme memastikan keterjangkauan program pembangunan terhadap kelompok-kelompok perempuan miskin dan marginal sehingga mereka dapat menikmati manfaat program dan pada akhirnya dapat keluar dari kemiskinannya. Ketiga, analisis gender dan pluralisme ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan orang miskin, kelompok marginal, minoritas, berbasis keadilan gender.<sup>6</sup>

Dengan begitu, melalui defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas ini, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program-program pembangunan secara umum dapat ditingkatkan. Seluruh proses yang ada diupayakan dapat memperkuat proses demokratisasi di tingkat lokal karena proses ini merupakan salah satu perwujudan upaya pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik sebagaimana diharapkan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Disarikan dari dokumen “Ringkasan Gender Watch” (Jakarta: Institut Kapal Perempuan, 30 Juli 2013).

## Tujuan Defeminisasi Kemiskinan

1. Menggugah kesadaran perempuan-perempuan miskin akan kondisi kemiskinannya, dan upaya mengembangkan kapasitas (*capacity building*) untuk melawan dan keluar dari kemiskinannya.
2. Mengupayakan kesadaran pemerintah akan pentingnya melakukan pembangunan yang berpihak pada komunitas perempuan miskin.
3. Mengkampanyekan penegakan prinsip-prinsip dan proses tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan efektifitas pembangunan di tingkat lokal sehingga terintegrasi dengan proses penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan.
5. Menganalisis berbagai kebijakan yang terkait dengan program pembangunan serta mempertimbangkan kepentingan dan prioritas para pihak, terutama kepentingan perempuan dan kelompok miskin, marginal dan minoritas di perdesaan.

## Strategi Defeminisasi Kemiskinan

Defeminisasi kemiskinan bukan semata-mata kegiatan pemberdayaan komunitas perempuan, tetapi mencakup keseluruhan aktifitas yang melingkupinya. Upaya penyadaran terhadap kondisi kemiskinan perempuan dan gerakan melawan kemiskinan serta melek terhadap pembangunan merupakan bagian dari hal-hal yang dilakukan dalam gerakan defeminisasi kemiskinan. Ada empat kegiatan utama dalam defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas, yaitu:

1. *Knowledge Development*: Mengembangkan pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan dan sistem perlindungan sosial. Kegiatan-kegiatan dalam knowledge development ini adalah riset tentang kemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan partisipasi perempuan di ranah publik.
2. Advokasi Berbasis Data: Melakukan advokasi berbasis data hasil riset di tingkat kabupaten dan desa; juga membangun kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan penganggaran yang dapat memastikan perempuan miskin dan kelompok marginal lainnya dapat mengakses program-program pemerintah.



3. Penguatan Kapasitas: Melakukan training-training kepemimpinan perempuan untuk perempuan miskin; Mengembangkan kelompok-kelompok perempuan miskin sebagai pusat pembelajaran mereka; Memfasilitasi partisipasi perempuan miskin dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
4. Penguatan Jaringan: Pengembangan humas dan jaringan; Melakukan kampanye-kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran perempuan miskin akan hak-haknya sebagai manusia, perempuan dan warga negara.<sup>7</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, kegiatan implementasi defeminisasi kemiskinan yang dilakukan di desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik merupakan salah satu kegiatan dari upaya pemberdayaan perempuan miskin dan marginal. Meski demikian, keseluruhan kegiatan yang mencakup *knowledge development*, advokasi berbasis data, penguatan kepemimpinan perempuan dan penguatan jaringan, merupakan rangkaian kegiatan yang saling mendukung satu dengan lainnya.

Bagan 1. Alur Kegiatan implementasi defeminisasi kemiskinan yang dilakukan di desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik



### Gambaran Singkat Lokasi Pengabdian

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Mondoluku tahun 2012, jumlah penduduk Desa Mondoluku sebesar 1.462 orang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 738 orang dan perempuan sebanyak 724 orang. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 496 KK laki-laki dan 57 KK perempuan. Sehingga Jumlah KK di Desa Mondoluku adalah 553 KK. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk Desa Mondoluku mengalami

<sup>7</sup> *Ibid.*

perubahan. Hal ini sesuai dengan *update* data 3 bulan terakhir, jumlah penduduk Desa Mondoluku berdasarkan data Administrasi Pemerintahan bulan Oktober-Desember 2013, berturut-turut 1.468 orang, 1.466 orang dan 1.471 orang. Dengan keseluruhan komposisi laki-laki lebih banyak dari perempuan.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Wringinanom dalam Angka, luas Desa Mondoluku adalah 3,80 Km<sup>2</sup> dan secara geografis Desa Mondoluku memiliki topografi ketinggian berupa daratan sedang yaitu sekitar 376 m di atas permukaan air laut yang merupakan tanah subur sehingga tanahnya efektif dipakai untuk lahan pertanian. Desa Mondoluku memiliki pembagian wilayah yang terdiri dari 2 Dusun yakni Dlangu dan Buku yang masing-masing memiliki 2 RW dan 6 RT sehingga total RW desa Mondoluku adalah 4 RW dan 12 RT.<sup>9</sup>

Dalam hal pendidikan Desa Mondoluku memiliki 1 gedung Sekolah Dasar, 1 gedung Taman Kanan-Kanak, 1 gedung PAUD, 1 gedung Diniyah dan 1 gedung TPQ. Dengan jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar sebanyak 10 orang dan 135 murid. Sedangkan jumlah guru Taman Kanan-Kanak sebanyak 3 orang dengan jumlah murid 50 anak. Untuk PAUD, jumlah guru sebanyak 2 orang dengan 21 murid. Diniyah ada 3 guru dengan 36 murid dan TPQ ada 7 guru dengan 65 murid. Data tersebut diambil dari data administrasi pendidikan desa.<sup>10</sup>

Selain penduduk desa yang masih aktif sekolah, rata-rata penduduk desa Mondoluku tamat SD dan SMP. Ada juga yang buta huruf dan tidak tamat SD. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Mondoluku tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi, pernikahan dini dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Mondoluku baru tersedia di tingkat pendidikan dasar. Sementara untuk pendidikan tingkat menengah pertama dan pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang lokasinya jauh dari rumah penduduk.

Desa Mondoluku merupakan wilayah agraris sehingga mayoritas penduduknya bercocok tanam/ bertani dengan jumlah 233 orang yang bertani. Baik yang pemilik sawah maupun yang buruh. Sebagian lain bekerja di sektor perdagangan dengan jumlah 68 orang, angkutan 5 orang,

---

<sup>8</sup> Balai Desa Mondoluku, Profil Desa Mondoluku, Tahun 2012

<sup>9</sup> BPS, Kecamatan Wringinanom dalam Angka, Tahun 2012

<sup>10</sup> Balai Desa Mondoluku, Data Administrasi Pendidikan Desa, Tahun 2013

ketrampilan 20 orang, jasa lainnya (bank simpan pinjam kecamatan) 17 orang, pemerintahan 13 orang, sektor industri/ pekerja pabrik 56 orang dan sektor lain 36 orang; total keseluruhan 448 orang. Selebihnya adalah sebagai Ibu rumah tangga 472 orang, masih sekolah dan tidak bekerja 34 orang, bekerja tak tentu 498 orang, dan cacat yang tidak bekerja 10 orang.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara yang didapat, penduduk yang bekerja tidak menentu meliputi: mencari jangkrik, mencari ular, mencari kalajengking yang bisa dijual. Penduduk Desa Mondoluku juga punya kerja sambilan yang biasanya dilakukan perempuan saat pulang dari sawah, ibu-ibu rumah tangga dan yang tidak punya pekerjaan lain yakni dalam bidang *furniture*,<sup>12</sup> terdiri dari menganyam batang pisang (*ngeleles*) dan menganyam rotan (laci).

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Mondoluku Rp. 15.000/hari. Untuk upah buruh tani Rp. 20.000-35.000/hari. Upah buruh pabrik Rp. 34.000/hari. Upah menganyam batang pisang Rp. 1.200-1.400/kg. Sehari rata-rata mendapatkan 10 kg sehingga penghasilannya = Rp. 12.000-Rp. 14.000. Upah menganyam rotan Rp. 400-Rp. 500/biji. Dalam sehari rata-rata mendapatkan 10 biji sehingga penghasilan per hari = Rp. 4.000-Rp. 5.000. Bagi yang bekerja di sektor industri, rata-rata penghasilannya Rp. 1.000.000/bulan. Sedangkan yang bekerja di bank, penghasilannya Rp. 1.500.000/bulan. Untuk aparat desa mendapatkan upah minimum kerja (UMK) Rp. 2.200.000/bulan, ditambah lahan sawah yang bisa dikelola selama menjadi aparat.<sup>13</sup>

Tingkat kesejahteraan desa Mondoluku tertinggi berada pada pra sejahtera dengan jumlah 252 KK; yang selebihnya sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera plus dari 504 KK. Hal ini menunjukkan desa Mondoluku masih berada dalam garis kemiskinan, bahkan mungkin di bawah garis kemiskinan.<sup>14</sup>

Dalam hal pernikahan, yang tercatat dalam buku catatan kehendak menikah desa Mondoluku tahun 2012, ada 23 pasangan dengan kriteria 18 pasangan jejaka dan perawan dengan 13 perempuan diantaranya menikah di

---

<sup>11</sup> Balai Desa Mondoluku, Profil Desa Mondoluku, Tahun 2012

<sup>12</sup> Maksud pekerjaan *furniture* di sini adalah menjadi buruh anyam perabot rumah tangga dari rotan, dan juga menganyam batang pisang.

<sup>13</sup> Shobirin (Ketua RW VII Desa Mondoluku), Wawancara pada tanggal 20 Januari 2014.

<sup>14</sup> Kecamatan Wringinanom dalam Angka, Tahun 2012.

bawah usia 18 tahun. Selain itu ada 5 laki-laki dengan status duda karena cerai dan 3 perempuan dengan status janda karena cerai yang menikah pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, tercatat usia termuda adalah perempuan dengan status janda menikah lagi pada usia 15 tahun (kelahiran 1997). Dan usia yang paling tua adalah perempuan dengan status janda menikah lagi pada usia 49 tahun (kelahiran 1963). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai formalitas yang sewaktu-waktu bisa dilakukan dan sewaktu-waktu bisa diceraikan.<sup>15</sup>

Di Desa Mondoluku terdapat Pura “medang kamulan” yang merupakan tempat peribadatan umat Hindu dengan jumlah pengikutnya 11 orang yang merupakan warga pendatang.<sup>16</sup> Akibat adanya “pura” ini, kondisi sosial masyarakat Mondoluku sempat terjadi hubungan yang tidak harmonis seperti mengejek, sinis dan membedakan antar umat beragama. Hal tersebut masih terjadi pada tahun 2013 yang dibuktikan dengan warga muslim yang sinis dengan kedatangan warga Hindu dalam perkumpulan.

Warga Mondoluku juga masih menghormati para leluhur dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat yang dianggap keramat yakni punden dan makam pembabat alas Desa. Kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual di punden tersebut diantaranya adalah berdo'a dan pergelaran wayang/ludruk dengan membawa sesajen bunga 7 rupa setiap setahun sekali saat panen raya. Ritual ini pun tidak begitu digemari oleh masyarakat desa Mondoluku sehingga yang masih bertahan hanya beberapa orang berkisar 15 orang. Para penduduk yang tidak menyukai ritual ini menganggapnya sebagai *syirik* yang menyalahi aturan agama, hal itu kemudian cukup mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di antara warga yang berbeda ritual tersebut.<sup>17</sup>

Jarak tempuh desa Mondoluku ke Kecamatan sejauh 8 Km dan jarak desa Mondoluku ke ibu kota Kabupaten sejauh 41 Km. Jarak desa Mondoluku dengan SMP terdekat adalah 1 Km dengan kualitas pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat dari sering kosongnya jam pelajaran yang disebabkan ketidakhadiran guru sehingga penduduk desa Mondoluku lebih memilih sekolah di SMP yang jaraknya 2 Km - 3 Km. Persoalan transportasi menjadi kebutuhan pokok dalam beraktivitas. Sedangkan transportasi yang

---

<sup>15</sup> Pembantu PPN Jawa, Buku Kehendak Nikah Mondoluku 2012 dan 2013

<sup>16</sup> Balai Desa Mondoluku, Profil Desa Mondoluku, Tahun 2012.

<sup>17</sup> Bari (Tokoh Adat), Wawancara pada 20 November 2014, Pukul 17.00-18.30 WIB.

dimiliki di Desa Mondoluku adalah sepeda motor yang dimiliki individu. Di desa tersebut tidak ada angkutan umum.

Hasil data dari profil desa Mondoluku, prasarana peribadatan umum paling banyak adalah musholla dengan jumlah 9 unit, sedangkan masjid 2 unit dan Pura 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Mondoluku gemar membangun musholla dan banyak mengadakan kegiatan di musholla.<sup>18</sup>

Tingkat kemiskinan perempuan bisa dilihat dari bantuan perlindungan sosial berupa raskin. Menurut data nama-nama penerima raskin/ RTM desa Mondoluku, jumlah penduduk yang terdaftar sebanyak 259 KK dari 553 KK. Dengan jumlah KK perempuan yang masuk berjumlah 43 KK. Sehingga jumlah penduduk perempuan yang masuk dalam angka kemiskinan ada 301 orang dari total penduduk yang menerima raskin 576 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Aktivitas harian masyarakat desa Mondoluku berdasarkan jenis kelamin digambarkan pada tabel 2 sebagaimana berikut:

Tabel 2. Aktivitas Harian Masyarakat Mondoluku Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Pukul</b>	<b>Aktivitas Perempuan</b>	<b>Aktivitas Laki-laki</b>
03.00-04.30	Bangun tidur, mandi, sholat Shubuh, memasak	bangun, sholat subuh, tidur
04.30-06.00	Melanjutkan memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu, menyiapkan anak berangkat sekolah, Sarapan.	Tidur, memberi makan ternak, Sarapan
06.00-11.00	Ke sawah	Ke sawah
11.00-11.30	Pulang dari sawah	Pulang dari sawah
11.30-13.00	Mandi, sholat dzuhur, makan, istirahat	Mandi, sholat dzuhur, istirahat
13.00-14.30	Mencari rumput / melilit batang pisang/membuat laci	Mencari rumput/pergi ke warung kopi
14.30-15.00	Pulang dari mencari rumput/melilit batang pisang/membuat laci	Pulang dari mencari rumput/pergi ke warung kopi
15.00-15.30	Sholat asar	pergi ke warung kopi/merumat

<sup>18</sup> Balai Desa Mondoluku, Profil Desa Mondoluku, Tahun 2012

Pukul	Aktivitas Perempuan	Aktivitas Laki-laki
15.30-17.00	Bersih-bersih rumah/ melilit batang pisang/membuat laci	ternak/istirahat/sholat asar Pergi ke warung kopi/istirahat di rumah
17.00-18.00	Mandi, sholat maghrib	Mandi, sholat maghrib
18.00-19.00	melilit batang pisang/membuat laci/ Menonton tv, makan	Pergi ke warung kopi/istirahat
19.00-20.00	Sholat isya', Menonton tv/ melilit batang pisang/membuat laci/belajar bersama anak.	Sholat isya', Pergi ke warung kopi/istirahat
20.00-03.00	Tidur	Pergi ke warung kopi/istirahat, tidur

Profesi perempuan Desa Mondoluku selain jadi Ibu Rumah tangga adalah sebagai petani dan buruh tani. Upah sebagai buruh tani dengan durasi 5 jam dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Untuk perempuan upah yang didapat Rp. 20.000 sedangkan laki-laki Rp. 30.000 bagi yang tidak membawa makan sendiri. Dan bagi buruh tani yang membawa makan sendiri untuk perempuan mendapatkan upah Rp. 25.000 dan bagi laki-laki Rp.35.000. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat masih menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan sehingga hasil pekerjaan dinilai lebih banyak dari pada perempuan meskipun hal tersebut tidak selalu demikian.<sup>19</sup>

Dalam rangka menambah penghasilan suami dan tuntutan kebutuhan sehari-hari, masyarakat perempuan Mondoluku juga tidak bisa diam setelah bertani. Mereka juga bekerja melilit batang pisang yang akan dijadikan kursi. Tiap hari maksimal menghasilkan 10 Kg lilitan yang dihargai Rp. 12.000- Rp. 14.000 sesuai dengan besar kecil diameter lilitan.<sup>20</sup>

Selain melilit batang pisang, Ibu rumah tangga desa Mondoluku juga membuat laci yaitu melilitkan rotan ke kayu persegi panjang. Satu biji laci dihargai Rp. 400 - Rp. 500 tergantung kerumitan lacinya. Sehari jika membuatnya dari jam 07.00 WIB pagi hingga petang jam 16.00 WIB dikurangi istirahat, sholat, makan mereka menghasilkan 10-15 biji laci. Sehingga dalam sehari mendapatkan upah Rp. 4.000-Rp. 5.000. Laci-laci itu dikumpulkan di rumahnya masing-masing dan akan diambil para pengepulnya 1 minggu 2 kali untuk dijadikan *furniture* rumah tangga. Meski

<sup>19</sup> Sapani (Warga Desa Mondoluku), Wawancara pada 10 Januari 2014

<sup>20</sup> Sulipah (Warga Desa Mondoluku), Wawancara pada 08 November 2013

upah pekerjaannya tidak seberapa namun perempuan-perempuan Mondoluku tetap melakukannya karena mereka tidak mau menganggur.<sup>21</sup>

Di sini nampak bahwa perempuan-perempuan Mondoluku memiliki aktivitas yang lebih (multi beban) daripada laki-laki. Pekerjaannya pula dianggap sebagai penghasilan sampingan dari penghasilan suami. Padahal Ibu rumah tangga juga menjaga anaknya yang masih balita pada saat membuat ketrampilan tersebut. Bagi perempuan-perempuan Mondoluku yang punya anak PAUD/TK, pada pagi harinya mereka mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Setelah itu baru bekerja.

Tingkat partisipasi perempuan Mondoluku dalam berpolitik masih rendah, mereka hanya terlibat dalam peserta pemilihan umum. Bahkan dalam jabatan pemerintahan hanya ada 1 perempuan yang menjabat. Perempuan juga jarang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa kecuali memasak nasi atau makanan untuk pekerja bakti membangun jalan. Dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang) juga tidak dilibatkan. Hal itu dikarenakan kebiasaan masyarakat yang mengikuti kegiatan musyawarah adalah laki-laki, sehingga ketika perempuan diundang untuk terlibat, tidak ada yang datang kecuali aparat pemerintah. Hal ini sama juga ketika monitoring dan evaluasi pembangunan, perempuan-perempuan desa Mondoluku juga tidak dilibatkan.

Dalam hal hubungan kekeluargaan dan kasus-kasus yang dialami perempuan di Desa Mondoluku dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak ada yang mengalami poligami, KDRT, perselingkuhan, trafficking anak, kawin paksa, perkawinan dini dan kekerasan seksual yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan kasus-kasus seperti itu adalah hal yang biasa yang merupakan aib keluarga dan tidak perlu dilaporkan. Memang dalam pelaporan tidak ada kasus-kasus diatas, namun kenyataannya hal itu masih ada, terbukti dari usia pernikahan di buku catatan kehendak nikah desa Mondoluku usia termuda pernikahan 15 tahun, dimana hal ini sudah melanggar UU pernikahan dan UU perlindungan anak.<sup>22</sup>

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik memang tidak ada namun dari hasil penelitian dan wawancara ditemukan perempuan yang mengalami kekerasan psikis seperti dibentak, dihina karena

---

<sup>21</sup> Rahayu (Warga Desa Mondoluku), Wawancara pada 09 Januari 2014

<sup>22</sup> Latifah (Ketua Muslimat NU Desa Mondoluku), Wawancara pada 10 Januari 2014

masakan, dihina karena pendidikan, perselingkuhan dan dibatasi dalam aktivitas keluar rumah masih banyak.

Dalam usia di atas 16 tahun, setelah lulus SMP para orang tua akan segera mencari pasangan bagi anak perempuannya. Hal ini sudah menjadi tradisi orang Mondoluku bahwa pada usia tersebut jika anak tidak bisa melanjutkan sekolah dan sudah ada yang mau melamar, maka anak tersebut segera dinikahkan. Para orang tuapun biasanya mencari suami anaknya yang sudah mapan/sudah bekerja dengan penghasilan yang tinggi atau dari keluarga yang kaya. Disini nampak bahwa perempuan dipaksa menikah oleh orang tunya. Dalam hal kesehatan reproduksi perempuan, perempuan Mondoluku dua tahun terakhir ini tidak ada yang sunat. Para medis di Desa Mondoluku sudah paham akan bahaya sunat sehingga setiap selesai persalinan, bayi perempuan tersebut tidak disunat.<sup>23</sup>

### **Fasilitator Defeminisasi Kemiskinan**

Fasilitator atau Tim yang mendampingi komunitas perempuan miskin (Mondoluku) dalam gerakan feminisasi kemiskinan ini adalah aktor-aktor sosial yang tergabung dalam organisasi sosial bernama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K)”. lembaga ini berdomisili dalam sebuah kesekretariatan yang beralamat di Sukodono Sidoarjo. Dalam konteks ini penulis termasuk aktor yang terlibat dalam Tim KPS2K.

Tim defeminisasi kemiskinan terbagi kedalam peran dan tugas (*job*) masing-masing. Struktur peran dalam tim defeminisasi kemiskinan adalah: Konsultan (Iva Hasanah), Kordinator (Muhammad Fahmi), Advokasi (Ira Dwi Patmawati), *Capacity Building* (Rumi Handayani), MIS (Rena), Finance (Diyah). Gerakan defeminisasi kemiskinan ini bekerjasama dengan Institut Kapal Perempuan Jakarta dan disupport oleh Aus-Aid.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sulistiani (Bidan Desa Mondoluku), Wawancara pada 19 November 2013, Pukul 07.30-09.00.

<sup>24</sup> Gerakan defeminisasi kemiskinan ini sebenarnya tergabung dalam program Gender Watch yang durasi waktunya selama 7 tahun sejak 2013-2019. Meski demikian, penulis (Muhammad Fahmi) hanya bergabung selama 2 tahun (2013-2015), dan dalam durasi 2 tahun penulis dapat mengidentifikasi gerakan defeminisasi kemiskinan dalam program Gender Watch ini. Pada tahun 2013-2014 penulis berperan sebagai kordinator, sedangkan tahun 2014-2015 penulis berperan dalam tugas advokasi.



## Hasil Pendampingan

### *Knowledge Development*

Kegiatan dalam *knowledge development* (penguatan pengetahuan) ini adalah riset tentang kemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) di lokasi dampingan (Mondoluku Wringinanom Gresik). Riset ini fokus pada beberapa persoalan, yaitu: potret feminisasi kemiskinan, sejarah feminisasi kemiskinan, penyebab feminisasi kemiskinan, dampak feminisasi kemiskinan, dan program pemerintah daerah dalam mengatasi feminisasi kemiskinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan dokumentasi. Gambaran ringkas dari hasil riset ini dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut.

Tantangan yang paling dirasakan dalam hal ekonomi keluarga masyarakat Mondoluku adalah penghasilan utama berasal dari pekerjaan suami. Sedangkan kaum perempuan aktivitasnya hanya sebatas mengurus Rumah Tangga, ada sebagian yang bekerja sebagai buruh tani musiman (*mreman*), dan ada juga yang berusaha di rumah dengan berjualan, serta bekerja *ngeleles* pelepah pohon pisang untuk bahan kursi; tetapi mereka bekerja dengan penghasilan yang minimalis (antara 10.000-20.000 per hari dan tidak menentu). Penghasilan perbulan rumah tangga rata-rata Rp. 500.000 – 750.000, yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, sekolah anak, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Di antara kesulitan perempuan keluar dari situasi ini adalah tidak adanya dukungan permodalan untuk usaha dan mereka sudah merasa sibuk dan capek mengurus Rumah Tangga. Hal lainnya adalah tingkat pendidikan yang terbatas, rata-rata hanya tamat SD, beberapa SMP dan SMA, hal ini membuat perempuan sulit mengembangkan diri dan mengakses pekerjaan yang lebih baik. Keterbatasan ini membuat atau mengkondisikan perempuan untuk pasrah terhadap keadaan dan tidak memiliki spirit untuk berusaha memperbaiki kondisi yang mereka alami. Ini tergambar ketika mereka ditanya tentang usaha apa yang akan dilakukan jika diberikan modal, hampir semua perempuan merespon dengan mengatakan mereka sudah sibuk di rumah tangga dan biar suami saja yang bekerja. Hanya sedikit peserta yang mengatakan akan mencoba berjualan.

Kemiskinan perempuan tampak dialami oleh Tukaeni (33 tahun). Dia menikah pada usia 15 tahun dan suaminya 23 tahun. Setelah menikah, dia ikut KB sampai usia pernikahan 4 tahun. Ketika mengandung anak pertama

---

<sup>25</sup> FGD pada tanggal 15 Desember 2014.

(tahun 1999), dia tidak menginginkan makanan lain selain buah-buahan (apel). Ketika melahirkan, dia dibantu bidan dan sangat merasakan kesakitan. Tidak ada orang tua yang menolong karena jarak rumah orang tua jauh. Anaknya yang pertama bernama Sinta, sekarang kelas 2 SMP Dawar. Dengan jarak sekolah yang jauh, Sinta tidak mau membawa motor keluarga satu-satunya karena jelek. Motor itupun dipakai ayahnya ke sawah untuk bertani.<sup>26</sup>

Para perempuan di wilayah dampungan umumnya hanya berpendidikan SD, dan sebagian SMP/SMA, dan juga tidak memiliki pekerjaan yang memiliki implikasi signifikan pada persoalan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang terbatas maka anak laki-laki lah yang mendapat prioritas untuk disekolahkan.<sup>27</sup>

Kasus KDRT masih banyak ditemukan di masyarakat namun kasus seperti ini jarang diangkat ke permukaan karena dianggap masalah pribadi dan berkaitan dengan nama baik keluarga. Kasus KDRT biasanya disebabkan karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan cemburu. Terkadang perempuan masih lebih memilih menikmati mengalami KDRT daripada dipoligami atau suaminya selingkuh atau dicerai, sehingga ketika suami melakukan KDRT, mereka lebih memilih diam dan mengalah.<sup>28</sup>

Partisipasi perempuan dalam forum-forum perencanaan pembangunan dan penganggaran masih sangat terbatas. Perempuan jarang diundang, dan tidak dilibatkan dalam forum-forum seperti itu. Walaupun diundang dalam pertemuan-pertemuan, masih ditemukan perempuan-perempuan yang hanya diam tidak mengeluarkan pendapatnya.

Perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki memiliki beban kerja yang lebih banyak baik dari segi jenis pekerjaan maupun lama kerja. Perempuan tidak saja bekerja di dalam rumah tangga tetapi juga melakukan pekerjaan di sawah/kebun dan terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Waktu kerja perempuan pun lebih panjang daripada laki-laki. Meskipun perempuan terlibat dalam berbagai pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah tapi dalam pengambilan keputusan laki-laki lah yang mengambil keputusan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Tukaini (Perempuan miskin usia 33 Tahun), Wawancara pada 17 desember 2014.

<sup>27</sup> Iva Hasanah (Aktivis Sosial KPS2K), Wawancara pada 30 Desember 2014.

<sup>28</sup> Istiqomah (Aktivis Sosial Gender Watch), Wawancara pada 19 Desember 2014.

<sup>29</sup> Rumi Handayani (Aktivis Sosial KPS2K), Wawancara pada 30 Desember 2014.

Di antara para perempuan miskin, ada yang melihat kemiskinan yang dialaminya sebagai nasib dan takdir. Hal ini –misalnya- disampaikan Ibu Sami, yang menyatakan bahwa perempuan miskin itu karena nasib seseorang yang sudah digariskan demikian.<sup>30</sup> Di sisi lain, Ibu Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa nasib yang menyebabkan kemiskinan. Dia juga menuturkan pengalamannya bahwa nasib seseorang sudah ditentukan dari Tuhan sehingga upaya mengubah keadaan yang miskin tersebut sulit, seperti ungapannya:

*“Kulo sak wontene mawon, seng penting usaha, wis nopo jare pengeran, masio nyambut damel jungkir walik, lek dereng di sukani sugeh nggih mboten sugeh”* (Saya seadanya saja, yang penting berusaha, ya apa kata Tuhan, walaupun bekerja banting tulang kalau belum diberi kekayaan ya tidak kaya)<sup>31</sup>

Sementara itu, Min Ayustina (23 tahun) menyatakan, bahwa sejarah kemiskinannya diawali dari orang tuanya yang memang miskin. Min adalah seorang perempuan lulusan SMP, dulu sebenarnya dia sangat ingin melanjutkan sekolah ke SMA namun karena biaya yang mahal dan jarak sekolah yang cukup jauh, maka dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Dia mengatakan karena orang tuanya hanya seorang buruh tani yang tidak memiliki sawah sendiri dan berpenghasilan pas-pasan sehingga dia berpikir berulang kali untuk meneruskan sekolah, dia mengatakan takut putus sekolah dan akan malu jika itu terjadi, maka lebih baik sampai SMP saja.<sup>32</sup> Jadi kemiskinannya sudah dimulai dari keberadaan orang tuanya yang miskin, dan itu menyebabkan pendidikannya rendah, dan akhirnya memicu kondisi kemiskinannya.

Mengenai pandangan tentang penyebab kemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) juga beragam. Ada yang menyatakan bahwa perempuan miskin itu dikarenakan oleh sesuatu di luar dirinya. Ini pandangannya mengarah pada takdir sebagai penyebab kemiskinan perempuan.<sup>33</sup> Perempuan miskin yang lain menyatakan bahwa penyebab kemiskinan perempuan itu karena malas, karena salah dari perempuan itu sendiri yang tidak mau bekerja keras, dan juga tidak punya keterampilan

---

<sup>30</sup> Sami (Perempuan miskin usia 38 tahun), Wawancara pada 19 Desember 2014.

<sup>31</sup> Sri Wahyuni (Perempuan Miskin), Wawancara pada 22 Desember 2014

<sup>32</sup> Min Ayustina (Perempuan miskin usia 23 tahun), Wawancara pada 24 Desember 2014.

<sup>33</sup> Tukaini (Perempuan miskin usia 33 Tahun), Wawancara pada 17 Desember 2014.

untuk berusaha.<sup>34</sup> Berarti ini menyalahkan pada diri manusianya sendiri. Ini tidak menyalahkan sesuatu di luar diri manusia, tetapi kesalahan manusia yang menyebabkan kondisi kemiskinannya. Ada juga yang menyatakan:

*“Tiyang mboten nggadah niku nggeh sebabe sekolahe niku cuma SD, mboten saget nerusaken ngantos sarjana. Lek kados sampe sarjana kan ekonomine saget katah. Nek tiyang namung SD nggih nopo, engken ten pabrik empun namung ngoten. Nek tiyang gadah niku kan ngantos kuliah, ngantos sarjana, ngantos dadi wong martabat, dadi nggeh saget cukup ekonomine.”<sup>35</sup>* (orang tidak punya itu sebabnya sekolahnya saja hanya SD, tidak bisa meneruskan sampai sarjana. Jika sampai sarjana, ekonominya bisa banyak. Kalau orang hanya SD ya hanya kerja di pabrik, hanya bisa begitu. Kalau orang mampu ya sampai kuliah, sampai sarjana, sampai jadi orang bermartabat, jadi ya bisa cukup ekonominya).

Pandangan di atas menganggap bahwa rendahnya pendidikan formal menjadi penyebab kondisi kemiskinan, sehingga pendidikan tinggi diperlukan agar memperoleh pekerjaan yang baik supaya tidak miskin. Di satu pihak mereka tahu bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan pendidikan dan bersekolah yang tinggi, tetapi di lain pihak mereka juga menyadari bahwa sekolah memerlukan biaya yang tidak dapat mereka penuhi.

Tidak sepenuhnya benar asumsi yang menyatakan bahwa perempuan miskin hanya melihat penyebab kemiskinan karena takdir belaka. Perempuan miskin melihat bahwa takdir dan perilaku manusia sendiri secara bersama-sama mempunyai andil menjadi penyebab kemiskinan. Termasuk budaya patriarki juga menjadi penyumbang sebab kemiskinan perempuan.

Budaya Patriarki ini masih kental dianut oleh masyarakat Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan sebuah pemahaman bahwa pekerjaan seperti memasak, mencuci, menyapu dan mendidik anak menjadi tugas perempuan serta pantang bagi laki-laki untuk melakukan pekerjaan tersebut. Perempuan tidak mempunyai hak seperti laki-laki dalam hal pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan warisan penuh. Perempuan baru boleh keluar rumah bila semua pekerjaan rumah telah selesai, serta beberapa perlakuan yang bias gender masih sangat sering dijumpai dalam keseharian kaum

---

<sup>34</sup> Julaikha, Wawancara pada 24 desember 2014.

<sup>35</sup> Rikha, Wawancara pada 22 Desember 2014.

perempuan di Gresik, terutama di wilayah pedesaan.<sup>36</sup> Budaya patriarkhi juga terlihat dalam beberapa kondisi, antara lain: dalam keadaan keuangan yang terbatas maka anak laki-laki yang akan disekolahkan sedangkan anak perempuan putus sekolah dan membantu melakukan pekerjaan-perkerjaan di rumah, dalam pengambilan keputusan laki-laki yang mengambil keputusan, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Mengenai dampak feminisasi kemiskinan, banyak dialami oleh perempuan itu sendiri. Ketika kondisi keluarga miskin, maka yang sering menanggung pembiayaan keluarga adalah pihak perempuan. Ketika suami tidak punya uang, tidak jarang istri yang repot mencari pinjaman untuk keperluan makan, biaya sekolah, jajan anak, dan lain sebagainya. Dalam kondisi keluarga yang miskin, sering juga menuntut perempuan harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga, disamping mengurus pekerjaan rumah tangga. Ini menyebabkan perempuan miskin semakin mengalami beban ganda dalam rumah tangganya.<sup>38</sup>

Pemahaman perempuan tentang realitas kemiskinan –dalam bahasa Emy Susanti Hendrarso- merupakan *stocks of knowledge* yang mewarnai interpretasi dan pemaknaan mereka tentang kemiskinan yang dialaminya. Studi ini mengungkap bahwa bagi perempuan, kemiskinan selalu diartikan sebagai harus bekerja keras tanpa kenal lelah. Kondisi kemiskinan tersebut membuat beban hidup perempuan semakin berat, perempuan tidak berdaya di tengah-tengah kemiskinannya.<sup>39</sup>

Perempuan miskin lainnya menceritakan bahwa dia harus bekerja keras membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja serabutan. Seperti yang disampaikan Sami:

*“Damel nyukupi kebutuhan rumah tangga, nggeh kulo bekerja di sawah, nandur, mreman, lan nopo mawon sengan saget dikerjaaken,*

---

<sup>36</sup> Soerati Mardhiyaningsih (Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik), Wawancara pada 31 Desember 2014.

<sup>37</sup> Nuri Mardhiana (Kabid Sosial Budaya Kabupaten Gresik), Wawancara pada 31 Desember 2014.

<sup>38</sup> Iva Hasanah (Aktivis Sosial KPS2K), Wawancara pada 30 Desember 2014.

<sup>39</sup> Emy Susanti Hendrarso, “Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Volume 22, Nomor 4: 275-285 (Surabaya: Fisip-Unair, 2010).

*seng penting sgaet nambah penghasilan keluarga.”<sup>40</sup> (Untuk mencukupi kebutuha rumah, ya saya bekerja di sawah, menanam, serabutan, dan apa saja yang bisa dikerjakan, yang penting dapat menambah penghasilan keluarga).*

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa makna kemiskinan bagi perempuan berarti bekerja lebih keras dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Karena miskin, maka dianggap sah-sah saja kalau perempuan bekerja. Perempuan memaknai kemiskinan dengan pemakluman harus membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut banyak terungkap dari penuturan yang disampaikan oleh perempuan maupun laki-laki miskin di Desa Mondoluku Wringinanom Kabupaten Gresik.

Bagi perempuan-perempuan miskin, bekerja mencari nafkah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk keberlangsungan hidup rumah tangga karena memang tidak ada pilihan lain. Oleh karena miskin, perempuan mengartikan harus bekerja keras mencari nafkah, tetapi bila sudah berkecukupan tidak perlu lagi bekerja mencari nafkah. Dengan demikian, perempuan miskin memaknai kemiskinan dengan pengertian bersedia bekerja lebih keras dibandingkan perempuan yang hidup berkecukupan. Perempuan miskin memaknai kemiskinan dengan pengertian siap bergandeng tangan dengan laki-laki, suami dan anak-anak untuk kelangsungan hidup mereka.<sup>41</sup>

Kebijakan pemerintah kabupaten Gresik dalam mengatasi kemiskinan perempuan cukup banyak. Hal ini terlihat dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada, terkait dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan perempuan. Diantara program-programnya adalah: Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Program Penigkatan Keluarga Bercana, dan masih banyak lagi.<sup>42</sup> Meski demikian, pendekatan yang dipakai belum partisipatif dengan melibatkan langsung perempuan-perempuan miskin.

---

<sup>40</sup> Sami (Perempuan miskin usia 38 tahun), Wawancara pada 19 Desember 2014.

<sup>41</sup> Emy Susanti Hendrarso, “Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Volume 22, Nomor 4: 275-285 (Surabaya: Fisip-Unair, 2010).

<sup>42</sup> Pemda Gresik, *Laporan Kegiatan Pengendalian Bantuan Pengentasan Kemiskinan, Semester II* (Gresik: Bappelibangda, 2013).

### ***Advokasi Berbasis Data***

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam advokasi berbasis data antara lain: identifikasi para pemangku kepentingan, ini merupakan dasar utama dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat dilibatkan dalam gerakan defeminisasi kemiskinan. Pemilihan perwakilan para pihak ini mencakup semua pihak yang terkait, yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh program atau mereka yang sangat mempengaruhi program ini serta mereka yang memiliki informasi, sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk perumusan strategi dan pelaksanaan program yang lebih baik. Secara umum, pihak yang dapat terlibat dalam pemantauan ini antara lain adalah: kelompok perempuan miskin, perwakilan masyarakat di lokasi dampingan organisasi masyarakat sipil, media (jika dimungkinkan), institusi-institusi pemerintah daerah yang relevan, dan Institusi-institusi pemerintah pusat yang relevan.

Kegiatan berikutnya adalah audiensi dengan pemerintah untuk memberikan informasi dan mendapatkan dukungan terkait dengan gerakan defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas di Mondoluku. Pertemuan-pertemuan rutin pun dilakukan dengan forum multipihak demi mengkaji dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang dialami oleh perempuan.

Hasil dari kegiatan advokasi berbasis data ini antara lain: adanya dukungan penuh dari pemerintah kabupaten Gresik dan terlegalkan dalam dokumen MoU antara Bupati Gresik, Direktur KPS2K dan Direktur Institut Kapal Perempuan. Anggota forum multipihak pun meningkat melalui training-training dan workshop serta pertemuan rutin dalam hal mengkaji persoalan kemiskinan perempuan. Kebijakan pemerintah kabupaten Gresik pun sedikit demi sedikit mengarah pada keberpihakan pada kepentingan perempuan miskin, antara lain: ketika ada program atau kegiatan yang terkait dengan isu perempuan, lokasi yang diutamakan dipilih adalah desa Mondoluku.

### ***Capacity Building***

Di antara kegiatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam gerakan feminisasi kemiskinan ini adalah: pertemuan rutin dengan komunitas, training kepemimpinan perempuan, dan pembentukan sekolah-sekolah perempuan. Dalam pertemuan rutin bersama komunitas, persoalan-persoalan yang dibicarakan adalah meliputi tema-tema ketidakadilan gender dan solusi untuk menuju keadilan gender. Dalam training kepemimpinan

perempuan, materi-materi yang dilatihkan adalah seputar seks dan gender, partisipasi perempuan, kepemimpinan perempuan, dan problem solving terkait persoalan perempuan. Dalam sekolah-sekolah perempuan, materi-materi yang diajarkan adalah meliputi: belajar berorganisasi, pentingnya partisipasi perempuan, perlindungan sosial, dan lain-lain yang terkait dengan persoalan sosial dan perempuan.

Hasil dari kegiatan penguatan kapasitas komunitas ini antara lain: perempuan-perempuan yang tergabung dalam komunitas dampingan ini mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal partisipasi perempuan dan daya kritis terhadap persoalan yang melingkupi perempuan dan persoalan-persoalan sosial yang lain. Komunitas perempuan yang tergabung dalam kelompok dampingan ini, yang asalnya tidak berani berbicara di forum publik, setelah didampingi, menjadi berani bicara di forum publik. Mereka yang asalnya tidak dilibatkan dalam forum Musrenbang, setelah ada pendampingan, perwakilan mereka menjadi dilibatkan dalam forum Musrenbang Desa dan mereka berani menyampaikan aspirasinya di forum tersebut.

Dalam tanda kutip, perubahan-perubahan yang terjadi dalam komunitas dampingan sebagai dampak dari kegiatan *capacity building* antara lain: adanya perubahan kesejahteraan; adanya kesempatan perempuan memanfaatkan sumberdaya, kerja, kredit, pelatihan, dan program-program pemerintah; adanya kesadaran kritis perempuan dalam memahami hak-hak perempuan untuk setara dengan laki-laki sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan di tingkat rumah tangga dan masyarakat; adanya penguatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam rumah tangga dan komunitasnya.

### ***Networking***

Pengembangan jaringan (*networking*) dalam gerakan defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas ini adalah membuka peluang-peluang bagi komunitas dampingan untuk berjejaring dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat desa, kabupaten, atau provinsi; lembaga swasta maupun pemerintah. Beberapa lembaga yang menjadi jaringan komunitas dampingan antara lain: Pusat Telaah dan Transformasi Regional (Pattiro) Gresik, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Gresik, PUSHAM Ubaya, Ormas NU Ranting Mondoluku, dan lembaga-lembaga lain.

Dampak dari pengembangan jaringan ini antara lain: terbukanya akses untuk saling bersinergi dalam beragam macam kegiatan yang



bermanfaat bagi komunitas dampingan dan para pihak yang terkait. Komunitas pun semakin mendapatkan kekayaan wawasan dan dapat belajar banyak pengalaman dari lembaga-lembaga lain yang terkait. Akses untuk melakukan upaya mendorong perbaikan kebijakan publik pun semakin kuat dengan berjejaring.

## Kesimpulan

Gerakan defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas ini penting dilakukan dan direplikasikan ke tempat-tempat lain. Kemiskinan berwajah perempuan (feminisasi kemiskinan) menggejala di mana-mana. Kemiskinan perempuan dapat berupa: kemiskinan dalam hal ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan formal, terjadinya pernikahan pada usia dini, beban kerja ganda yang dialami, kekerasan dalam rumah tangga, minimnya partisipasi di publik, terjadinya domestikasi perempuan, rendahnya upah kerja, dan rendahnya kewenangan mengambil keputusan dibandingkan laki-laki.

Oleh karena masih merebaknya feminisasi kemiskinan, maka perlu gerakan defeminisasi kemiskinan berbasis komunitas, artinya gerakan memerangi kemiskinan perempuan dengan memanfaatkan potensi komunitas yang diberdayakan. Sebagaimana yang terjadi di Mondoluku, hasilnya cukup menakjubkan. Perempuan-perempuan miskin yang didampingi, yang awalnya miskin partisipasi menjadi berani partisipasi di ranah publik. Perempuan yang awalnya hanya menjadi *konco wingking* dan selalu dinomorduakan, menjadi berani untuk bersikap setara dengan laki-laki. Akhirnya upaya menuju kesetaraan gender dan keluar dari kemiskinan perempuan sedikit demi sedikit mulai tercapai.[]

## Daftar Pustaka

- Balai Desa Mondoluku, Data Administrasi Pendidikan Desa, Tahun 2013
- Balai Desa Mondoluku, Profil Desa Mondoluku, Tahun 2012
- Bappeda Kab. Gresik, *Dokumen Draft Laporan Akhir Program PJM-PRONANGKIS Kab.Gresik 2012* (Gresik: Bappeda, 2012),
- BPS, Kecamatan Wringinanom dalam Angka, Tahun 2012
- BPS, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* (Gresik: BPS, 2009)
- Dokumen “Ringkasan Gender Watch” (Jakarta: Institut Kapal Perempuan, 30 Juli 2013).

Emy Susanti Hendrarso, "Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan",  
*Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Volume 22, Nomor 4:  
275-285 (Surabaya: Fisip-Unair, 2010).

<http://gksbs.org/?p=852> (Diakses pada 12 Maret 2014).

Kecamatan Wringinanom dalam Angka, Tahun 2012.

KPS2K, *Profil Kabupaten Gresik*, Makalah tidak Dipublikasikan, 2013.

M. Fahmi, dkk., *Problem Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Gresik*  
(Surabaya: Jaudar Press, 2015).

Pembantu PPN Jawa, Buku Kehendak Nikah Mondoluku 2012 dan 2013

Pemda Gresik, *Laporan Kegiatan Pengendalian Bantuan Pengentasan  
Kemiskinan, Semester II* (Gresik: Bappelbangda, 2013).

### **Sumber Informan**

Bari (Tokoh Adat), Wawancara pada 20 November 2014, Pukul 17.00-18.30  
WIB.

FGD pada tanggal 15 Desember 2014.

Istiqomah (Aktivis Sosial Gender Watch), Wawancara pada 19 Desember  
2014.

Iva Hasanah (Aktivis Sosial KPS2K), Wawancara pada 30 Desember 2014.

Julaikha, Wawancara pada 24 Desember 2014.

Latifah (Ketua Muslimat NU Desa Mondoluku), Wawancara pada 10 Januari  
2014

Min Ayustina (Perempuan miskin usia 23 tahun), Wawancara pada 24  
Desember 2014.

Nuri Mardhiana (Kabid Sosial Budaya Kabupaten Gresik), Wawancara pada  
31 Desember 2014.

Rahayu (Warga Desa Mondoluku), Wawancara pada 09 Januari 2014

Rikha, Wawancara pada 22 Desember 2014.

Rumi Handayani (Aktivis Sosial KPS2K), Wawancara pada 30 Desember  
2014.

Sami (Perempuan miskin usia 38 tahun), Wawancara pada 19 Desember 2014.

Sami (Perempuan miskin usia 38 tahun), Wawancara pada 19 Desember 2014.

Sapani (Warga Desa Mondoluku), Wawancara pada 10 Januari 2014

Shobirin (Ketua RW VII Desa Mondoluku), Wawancara pada tanggal 20 Januari 2014.

Soerati Mardhiyaningsih (Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik), Wawancara pada 31 Desember 2014.

Sri Wahyuni (Perempuan Miskin), Wawancara pada 22 Desember 2014

Sulipah (Warga Desa Mondoluku), Wawancara pada 08 November 2013

Sulistiani (Bidan Desa Mondoluku), Wawancara pada 19 November 2013,  
Pukul 07.30-09.00.

Tukaini (Perempuan miskin usia 33 Tahun), Wawancara pada 17 Desember 2014.

